

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi saat ini, tingkat daya saing menjadi tolak ukur yang wajib dimiliki dalam mewujudkan persaingan pasar bebas baik dalam kegiatan maupun perdagangan ekonomi dunia yang menjadi pokok dari kekuatan pasar. Perkembangan pada tingkat daya saing baik dalam skala nasional maupun internasional tidak akan terlepas dari daya saing di tingkat regional.

Menurut Cahyono (2014), tingkat daya saing merupakan hal yang paling pokok yang harus dimiliki oleh setiap negara. Tingginya tingkat daya saing pada suatu negara, nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan yang meningkat. Setiap negara terlebih dahulu harus memantapkan perekonomiannya untuk dapat bersaing dengan negara lain. Perekonomian yang fundamental mampu meningkatkan mental pemerintah dalam rangka menghadapi globalisasi.

Globalisasi ekonomi akan terjadi apabila terdapat hubungan ketergantungan pada dua negara atau lebih yang berimplikasi pada sinergi negara-negara dunia tersebut meningkat. Begitu juga dengan hubungan yang erat akan terjalin antara perekonomian nasional dan internasional. Dengan munculnya globalisasi dapat memberikan berbagai dampak, yaitu produk dalam negeri dapat dengan mudah masuk pasar internasional yang memberikan dampak positif bagi negara tersebut, sebaliknya barang-barang

produk luar negeripun dapat dengan mudah masuk ke dalam pasar domestik. Dampak lain yang merugikan pasar domestik tersebut, dapat terjadi apabila suatu negara tidak memiliki kekuatan daya saing yang baik, dan untuk menghindari hal itu, tentunya setiap wilayah dituntut untuk dapat memiliki daya saing yang kompetitif. Untuk memiliki daya saing yang kompetitif, tentunya dibutuhkan strategi yang tepat, seperti membentuk suatu integrasi ekonomi untuk negara suatu kawasan. Kondisi geografis maupun historis suatu kawasan akan menjadi faktor pendorong integrasi ekonomi. Selain itu, integrasi ekonomi juga digunakan sebagai alat dalam memperoleh akses pasar yang luas serta mampu mendorong pertumbuhan untuk meningkatkan kesejahteraan kawasan ataupun negara-negara anggota suatu kawasan.

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pertama kali dibentuk pada tahun 1967, yang pada mulanya lebih berfokus pada kerja sama yang berorientasi pada dunia politik dalam rangka meningkatkan keamanan dan perdamaian negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Namun seiring berjalannya waktu, orientasi tersebut berubah menjadi kerjasama yang bersifat regional dalam rangka memperkuat stabilitas ekonomi maupun sosial di kawasan Asia Tenggara. Untuk memperkuat daya saing kawasan dalam menghadapi kompetisi global dan regional, negara-negara kawasan ASEAN telah sepakat dalam meningkatkan integrasi ekonomi melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diselenggarakan pada akhir tahun 2015. Kesepakatan dalam peningkatan integrasi tersebut semakin kuat dengan adanya krisis keuangan pada tahun 1997-1998. Dimana muncul persepsi para

investor asing yang mengatakan bahwasannya perekonomian negara-negara Asia Tenggara memang memiliki keterkaitan satu sama sama lain. Dorongan lainnya juga muncul dari kesadaran bahwa setiap negara tidak akan mampu berdiri sendiri yang menjadikan tren regionalisme semakin meningkat.

Deklarasi ASEAN *Concord II* diselenggarakan pada tahun 2003. Para petinggi ASEAN menyepakati pembentukan Masyarakat ASEAN 2020 yang mengandung tiga pilar, yakni Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN, Masyarakat Sosial dan Budaya ASEAN, serta Masyarakat Ekonomi ASEAN. Namun di tahun 2007, para petinggi ASEAN sepakat untuk melakukan percepatan realisasi pilar yang ketiga yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Dimana para petinggi ASEAN sepakat jika proses integrasi ekonomi regional dipercepat melalui Cetak Biru (*Blue Print*) Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2007 dengan begitu, program MEA pada tahun 2015 dapat terlaksana.

MEA merupakan suatu bentuk realisasi terhadap integrasi ekonomi. Adapun visi dari ASEAN tersebut adalah aliran bebas barang dimana pada tahun 2015 perdagangan barang dapat dilakukan secara bebas tanpa adanya hambatan, baik itu tarif maupun non-tarif. Dengan demikian, kondisi tersebut mampu menjadikan kawasan ASEAN sebagai basis produksi yang kompetitif, sekaligus menjadi pasar potensial dengan sekitar lima ratus juta orang penduduknya.

Menurut Djaafara (2012), MEA merupakan wujud strategi yang dilakukan ASEAN dalam menjadi *key player* pada persaingan internasional.

Selain itu, mampu memperkuat kedudukan ASEAN agar kestabilan tetap terjaga dan mampu memperoleh manfaat pada kerjasama regional dalam forum internasional. Negara-negara di kawasan ASEAN harus berbekal strategi maupun persiapan yang baik dalam rangka menghadapi MEA. Hal tersebut dikarenakan manfaat integritas ekonomi tidak dapat secara langsung dirasakan dikarenakan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan ASEAN yang memiliki kondisi perekonomian yang berbeda setiap negaranya, seperti halnya, tingkat pembangunan, sistem perekonomian, serta pendapatan perkapita. Oleh karenanya, diperlukan peran pemerintah yang senantiasa melakukan peningkatan volume perdagangan di negara-negara kawasan ASEAN maupun di luar negara-negara kawasan ASEAN.

Pertumbuhan ekonomi yang positif dari munculnya MEA akan sulit dicapai jika negara-negara di kawasan ASEAN tidak memiliki persiapan tingkat daya saing dalam menghadapi globalisasi perdagangan. Pertumbuhan tersebut tidak lepas dari produktivitas negara-negara kawasan ASEAN. Produktivitas tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, institusi, kebijakan serta faktor yang mempengaruhi daya saing. Perkembangan daya saing di negara-negara kawasan ASEAN dapat dilihat pada Tabel 1.1.

TABEL 1.1.

Perkembangan Peringkat Daya Saing negara-negara ASEAN dari tahun 2010-2015

NO	Nama Negara	<i>Global Competitiveness Index</i>					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Brunei D.	28	28	28	26	-	-
2	Cambodia	109	97	85	88	95	90
3	Laos	-	-	-	81	93	83
4	Malaysia	26	21	25	24	20	18
5	Myanmar	-	-	-	139	134	131
6	Philippines	85	75	65	59	52	47
7	Singapore	3	2	2	2	2	2
8	Thailand	38	39	38	37	31	32
9	Indonesia	44	46	50	38	34	37
10	Vietnam	59	65	75	70	68	56

Sumber: *World Economic Community (2015)*

Pada tahun 2014, Indonesia menduduki peringkat 34 dan turun menjadi peringkat 37 pada tahun 2015. Terdapat kesenjangan dalam daya saing yang cukup lebar antara negara-negara kawasan ASEAN lain seperti Singapura yang menduduki peringkat dua, Malaysia pada peringkat 18 serta Thailand pada peringkat 37. Peringkat daya saing tersebut diukur dengan menggunakan beberapa indikator yang telah ditentukan oleh *World Economic Forum* yaitu pengelolaan institusi secara tepat, kondisi dan situasi makro, pembangunan infrastruktur, kondisi dan situasi makro, pendidikan atas pelatihan, kesehatan dan pendidikan dasar, efisiensi pasar maupun tenaga kerja, pengembangan

pasar uang, skala pasar, lingkungan bisnis dan inovasi, serta kesiapan teknologi.

Ketimpangan yang terjadi pada tingkat daya saing tersebut dapat dihindari dengan cara meningkatkan daya saing pada sektor-sektor ekonomi baik di tingkat nasional maupun tingkat regional. xPeringkat daya saing industri di negara-negara kawasan ASEAN dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini.

TABEL 1.2

Peringkat Daya Saing Industri Negara-Negara ASEAN Tahun 2013

Negara	Daya Saing Industri (DSI)	Indeks DSI	Ekspors Manufaktur Per kapita	Indeks (EMP)	Sumbangan Ekspor Manufaktur Terhadap Total Ekspor (SETE)	Indeks (SETE)
Singapura	1	0,341	1	32,285.9	2	89,8
Malaysia	2	0,170	2	6,201.9	4	80,7
Thailand	3	0,167	3	2,998.6	3	88
Indonesia	4	0,087	7	438.8	7	60,1
Vietnam	5	0,071	4	1,128.9	5	78,4
Filipina	6	0,067	6	495.6	1	90,3
Kamboja	7	0,020	8	428.64	6	70,2
Brunei D.	8	0,019	5	887.4	8	3,2

Sumber: *United Nations Industrial Development Organization (2016)*

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2013 daya saing Indonesia berada pada peringkat empat. Peringkat tersebut dapat

berimplikasi pada rendahnya tingkat daya saing produk industri dalam negeri yang rendah, sedangkan produk industri negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand yang memegang peringkat tiga besar dalam tingkat daya saing industri. Tiga negara tersebut dapat dengan mudah mengambil alih pasar domestik. Rendahnya tingkat daya saing Indonesia dapat dilihat dari rendahnya peringkat ekspor manufaktur per kapita dimana Indonesia menempati peringkat ke-tujuh, begitu juga dengan sumbangan ekspor manufaktur terhadap total ekspor yang menduduki peringkat yang sama. Hal ini yang memperkuat pernyataan bahwa tingkat daya saing di Indonesia masih rendah di negara ASEAN.

Daya saing di tingkat nasional tidak lepas dari pengaruh daya saing tingkat regional. Pada Tabel 1.3 dijelaskan sepuluh peringkat daya saing provinsi di Indonesia pada tahun 2013-2014

TABEL 1.3.

Peringkat Daya Saing Provinsi di Indonesia 2013-2014

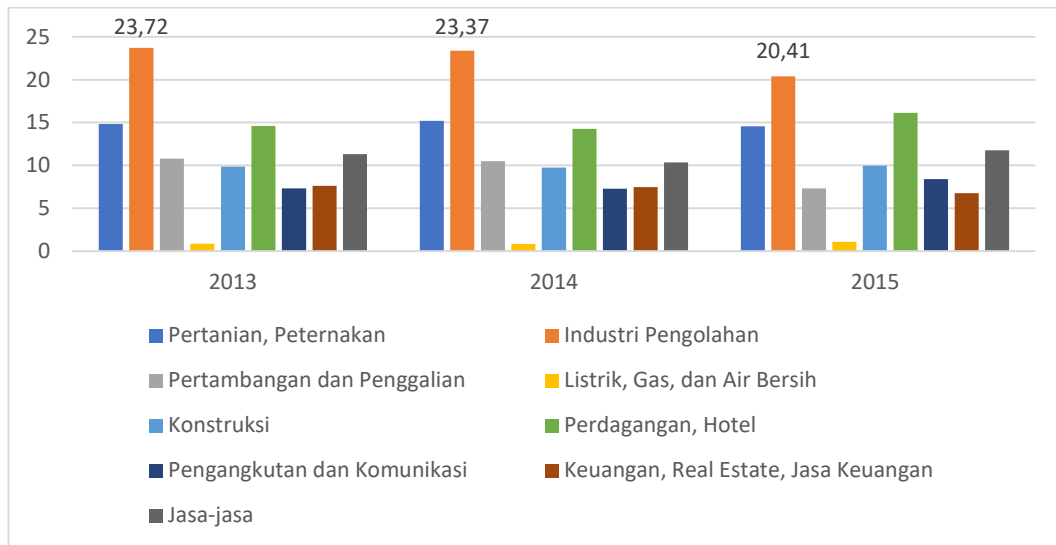
Peringkat 2014	Peringkat 2013	Provinsi	Skor 2014
1	1	DKI Jakarta	3,3580
2	2	Jawa Timur	1,8152
3	3	Kalimantan Timur	1,5566
4	5	Jawa Tengah	1,3262
5	4	Jawa Barat	1,0834
6	6	D.I. Yogyakarta	0,7047
7	11	Sulawesi Selatan	0,6684
8	13	Kalimantan Selatan	0,4884

9	10	Riau	0,3731
10	14	Sulawesi Utara	0,3109

Sumber: *World Scientific Publishing* (2014)

Dari Tabel 1.3 peringkat pertama daya saing provinsi di Indonesia diduduki oleh DKI Jakarta dengan skor 3,3580, sedangkan Jawa Tengah menduduki peringkat ke empat di tahun 2014 naik satu tingkat dari tahun 2013. *Asia Competitiveness Institute* (ACI) mendefinisikan indikator dalam pengukuran tingkat daya saing provinsi di Indonesia dengan melalui empat pendekatan. Pendekatan tersebut antara lain, kondisi ekonomi makro yang stabil (ekonomi regional, pasar terbuka, daya tarik investor asing), perencanaan pemerintah dan Institusi (regulasi pemerintah, fiskal, serta hukum), kondisi finansial bisnis, dan tenaga kerja (produktivitas, sumber daya manusia yang baik, bisnis yang efisien), serta kualitas hidup dan pembangunan sarana dan prasarana (pendidikan, kondisi sosial yang stabil, tinggi teknologi).

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu dari seluruh sektor-sektor ekonomi yang ada yang memiliki andil besar dalam pembangunan ekonomi. Peranan sektor industri dalam pembangunan nasional dapat dilihat dari kontribusi masing-masing subsektor terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi industri dapat dilihat dari presentase seluruh sektor dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Berikut adalah data PDB Indonesia mulai tahun 2013-2015 dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber: BPS Indonesia (2015)

GAMBAR 1.1.

Distribusi PDB atas dasar harga berlaku di Indonesia Tahun 2013-2015 (Persen)

Dari Gambar 1.4, dapat dilihat bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor yang paling besar dalam memberikan kontribusinya terhadap PDB Indonesia yaitu sebesar 20,41 persen dari total PDB seluruh sektor diikuti oleh pertanian, peternakan, perdagangan diurutan selanjutnya.

Hal ini selaras dengan visi dari pembangunan industri di tingkat nasional yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 mengenai Kebijakan Industri Nasional yang akan menjadikan negara Indonesia menjadi negara industri yang tangguh pada tahun 2025, Kementerian Perindustrian (2012).

Kementerian Perindustrian menetapkan dua pendekatan yang berkaitan dengan pembangunan daya saing industri di tingkat nasional yang tangguh dan utuh antara nasional maupun regional. Pendekatan yang dilakukan yaitu

dengan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pada pendekatan *top-down* yaitu mengembangkan beberapa kluster industri yang direncanakan oleh pusat dan diikuti oleh daerah yang kemudian diseleksi berdasarkan potensi yang dimiliki Indonesia dan daya saing secara global. Sedangkan pada pendekatan *bottom-up*, dalam hal ini pusat membantu mengembangkan kompetensi industri yang dimiliki oleh daerah, sehingga daerah juga akan memiliki tingkat daya saingnya. Pengembangan kompetensi ini yang dinamakan daya saing industri unggulan.

Menurut Alisjahbana (2014), koridor ekonomi yang mempunyai potensi industri nasional adalah koridor Pulau Jawa. Hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah industri yang berkembang di koridor tersebut.

TABEL 1.4.

*Nilai PDRB Industri Pengolahan di Pulau Jawa
Tahun 2010-2014 (Milyar Rupiah)*

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
Banten	107.806	117.850	126.818	142.544	148.148
DKI Jakarta	152.651.051	170.047.903	188.822.070	209.779.300	239.596.847
Jawa Barat	403.571	448.520	487.760	544.183	604.374
Jawa Tengah	215.156	241.531	263.739	294.967	336.070
D.I. Yogyakarta	9.215	10.280	10.242	11.563	12.614
Jawa Timur	292.708	326.628	365.694	397.997	445.296

Sumber: Badan Pusat Statistik tiap provinsi di Pulau Jawa (2010a-2014a)

Berdasarkan Tabel 1.4 di atas, dapat diketahui bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi pada sektor industri pengolahan walaupun masih tertinggal dengan provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur yang nilai PDRB ke tiga daerah tersebut lebih tinggi dibanding PDRB Jawa Tengah. Namun PDRB Jawa Tengah masih lebih unggul dibandingkan dengan D.I. Yogyakarta dan Banten. Meskipun demikian, nilai PDRB industri pengolahan secara keseluruhan mengalami tren yang positif dari tahun ke tahun.

Kinerja dari sektor-sektor perekonomian di daerah akan mempengaruhi daya saing daerahnya. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa sektor industri memberikan kontribusi yang besar bagi Indonesia oleh karena itu sektor industri disebut sebagai sektor unggulan yang mana dapat menghasilkan barang yang dapat diperdagangkan di pasar global, sehingga apabila terjadi penurunan produktivitas pada sektor industri di Provinsi Jawa Tengah, maka berimplikasi pada penurunan daya saing di Provinsi tersebut. Pengaruh dari penurunan daya saing perdagangan global di Jawa Tengah secara keseluruhan dapat dilihat dari nilai net ekspor di Jawa Tengah, dimana net ekspor didapatkan dari kinerja ekspor maupun impor yang dilakukan.

TABEL 1.5.

Nilai Net Ekspor Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2012-2014 (Ribu Rupiah)

Provinsi	2012	2013	2014
Banten	-2.027.160	-2.445.240	-1.949.710
DKI Jakarta	-36.990.644	-31.335.256	-21.755.450
Jawa Barat*)	-	-	-

Jawa Tengah	-9.384.502	-10.449.430	-10.167.430
D.I. Yogyakarta	1.283.264	1.709.972	1.380.178
Jawa Timur	-9.351.685	-9.537.688	-4.171.689

*)Data tidak tersedia

Sumber: Badan Pusat Statistik tiap provinsi di Pulau Jawa

Pada tahun 2012-2014, Provinsi Jawa Tengah memiliki net ekspor terendah kedua setelah DKI Jakarta, hal ini disebabkan karena jumlah ekspor di Jawa Tengah lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah impor yang berimplikasi pada defisit neraca perdagangan yang besar di Jawa Tengah. Dengan begitu dapat dilihat pada perdagangan internasional Provinsi Jawa Tengah berada pada tingkat daya saing yang rendah karena impornya yang masih mendominasi kegiatan perdagangan internasional di Provinsi Jawa Tengah. Dengan rendahnya tingkat daya saing tersebut, perlu untuk melakukan kajian ulang mengingat telah berlangsungnya program MEA. Jika tidak dilakukan evaluasi ataupun kajian mengenai tingkat daya saing di Provinsi Jawa Tengah maka peluang keuntungan yang dapat diperoleh oleh produsen, konsumen, ataupun perekonomian secara keseluruhan maka tidak akan bisa dirasakan manfaatnya secara optimal. Dengan demikian peningkatan daya saing industri di Provinsi Jawa Tengah dinilai sebagai hal yang penting mengingat program MEA telah berlangsung.

Peningkatan daya saing pada sektor industri pengolahan yang merupakan salah satu penghasil ekspor haruslah diupayakan perkembangannya, dengan cara menjadikan sektor industri pengolahan di

Provinsi Jawa Tengah menjadi prioritas perdagangan pada pasar tunggal MEA. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan bertekad dalam mengembangkan kemampuan ekspornya. Sehubungan dengan uraian di atas maka peneliti mengajukan penelitian mengenai “Analisis Strategi dan Program Peningkatan Daya Saing Pada Industri Unggulan Provinsi Jawa Tengah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, permasalahan yang terjadi dalam penelitian sebagai berikut:

1. Program MEA telah berlangsung, namun tingkat daya saing di Indonesia pada sektor industri pengolahan masih rendah untuk tingkat ASEAN.
2. Kinerja industri pengolahan di Provinsi Jawa Tengah memberikan kontribusi yang besar dalam globalisasi perdagangan. Namun, tingkat daya saing untuk Provinsi Jawa Tengah di tingkat internasional masih berada di bawah, dilihat dari nilai *net* ekspor yang negatif yang menandakan mengalami defisit anggaran pada neraca perdagangannya.
3. Manfaat yang ditimbulkan dengan adanya MEA tidak bisa dirasakan secara optimal apabila Provinsi Jawa Tengah mengalami kinerja industri yang rendah dan tidak dapat bersaing dengan negara-negara kawasan ASEAN lainnya.

Dari permasalahan yang terjadi diatas, didapatkan solusi-solusi yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, yaitu dengan cara melakukan penelitian untuk melihat bagaimana kondisi sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Tengah terutama pada sektor industri unggulannya, dimana sektor unggulan tersebut akan menjadi sektor prioritas pada perdagangan internasional dalam menghadapi MEA.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa jenis industri yang menjadi produk unggulan di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa jenis industri yang memiliki keunggulan kompetitif di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana kondisi daya saing untuk industri unggulan di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menghadapi MEA?
4. Apa strategi yang digunakan untuk meningkatkan daya saing industri unggulan di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menghadapi MEA?
5. Apa program strategis yang akan dibuat dalam rangka meningkatkan daya saing industri unggulan di Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi MEA?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang tujuannya untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam studi ini maka peneliti membatasi masalah pada tahun penelitian pengukuran daya saing Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir yakni pada tahun 2010-2014.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian dalam menganalisis strategi daya saing pada sektor industri unggulan di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi subsektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar yang nantinya akan dijadikan industri unggulan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui jenis industri apa saja yang memiliki keunggulan kompetitif di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui kondisi daya saing pada industri unggulan di Jawa Tengah dalam menghadapi MEA.
4. Untuk dapat merumuskan strategi yang digunakan dalam rangka meningkatkan daya saing pada sektor industri unggulan di Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi MEA.
5. Untuk dapat merumuskan program yang akan digunakan dalam rangka peningkatan daya saing pada sektor industri unggulan di Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi MEA.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat untuk berbagai kalangan. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ada dua yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan yang berkaitan dengan tingkat daya saing industri unggulan di Provinsi Jawa Tengah serta strategi dan program yang akan dibuat untuk meningkatkan daya saing tersebut agar mampu menghadapi MEA.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta memperluas kekayaan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan tingkat daya saing industri untuk tingkat regional serta solusi dan program yang akan dibuat dalam rangka meningkatkan daya saing.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu menyalurkan informasi mengenai tingkat daya saing industri unggulan Provinsi Jawa Tengah serta strategi dan program peningkatannya dalam menghadapi MEA.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menyalurkan informasi yang berguna berkenaan mengenai strategi dan program peningkatan daya saing industri unggulan.

b. Bagi Perindustrian dan Perdagangan

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan solusi dalam penyusunan ataupun pembuatan kebijakan strategi maupun program peningkatan sektor industri pengolahan khususnya dalam hal peningkatan daya saing dalam menghadapi MEA.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi perusahaan dalam menyusun kebijakan dan strategi-strategi ataupun program untuk peningkatan daya saing dalam menghadapi MEA.